



**MODUL**  
**GOVERNEMENT PUBLIC RELATIONS**  
**(MKC 115)**



**MODUL 11**

**Humas Pemerintah di Tengah Dinamika Politik**

Universitas  
**Esa Unggul**

DISUSUN OLEH  
**DR. SYAHRIAL SYARBAINI, MA**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**TAHUN 2019**

## **Kemampuan Akhir Yang Diharapkan**

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu : memahami & menjelaskan: Humas Pemerintah di tengah Dinamika Politik

Indikator:

- Humas pemerintah di tengah dinamika politik nasional
- Humas pemerintah di tengah dinamika politik local
- Humas pemerintah secara intern (netralitas ASN dan Asn dan humas pemerintah yang Profesional)
- Membangun citra dan reputasi

### **A. Humas pemerintah di tengah dinamika politik nasional**

Sebagaimana telah dibahas di atas bahwa begitu besarnya peran media massa dalam kehidupan masyarakat, yang mampu mempengaruhi dan merubah cara berpikir suatu kelompok masyarakat. Kekuatan media massa ini juga digunakan oleh pemerintah maupun suatu kelompok masyarakat tertentu di suatu pemerintahan untuk mempengaruhi opini publik. Dalam dunia politik pun media massa digunakan sebagai alat penyampaian informasi dan pesan yang sangat efektif dan efisien. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Lasswell (1972), bahwa *“the study of politics is the study of influence and the influential”* (ilmu tentang politik adalah ilmu tentang pengaruh dan kekuatan pengaruh). Tampilan media massa akan mengemban beberapa fungsi yang menggambarkan kedemokrasian dalam pemberitaannya. Fungsi-fungsi tersebut merupakan subsistem dari sistem politik yang ada. Menurut Gurevitch dan Blumer (1990:270) fungsi-fungsi media massa adalah: 1. Sebagai pengamat lingkungan dari kondisi sosial politik yang ada. Media massa berfungsi sebagai alat kontrol sosial politik yang dapat memberikan berbagai informasi mengenai penyimpangan sosial itu sendiri, yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah, swasta, maupun oleh pihak masyarakat. Contoh penyimpangan-penyimpangan seperti praktik KKN oleh pemerintah, penjualan pasir ke Singapura yang mengakibatkan tujuh pulau hilang dan tenggelam (suatu kerugian yang lebih besar dari sekadar perebutan pulau Sipadan dan Ligitan), perilaku masyarakat yang tidak tertib hukum/anarkis, polemik Susno-Polri, dan lain-lain. Berbagai permasalahan sosial tersebut akan membuka mata kita bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

2. Sebagai pembentuk agenda (*agenda setting*) yang penting dalam isi pemberitaannya. Pembentukan opini dengan cara pembentukan agenda atau pengkondisian politik sehingga masyarakat terpengaruh untuk mengikuti dan mendukung rencana-rencana pemerintah. Contohnya: wacana pembatasan subsidi BBM untuk sepeda motor, SKPP Bibit-Candra, dan lain-lain.
3. Media massa merupakan platform (batasan) dari mereka yang punya advokasi dengan bukti-bukti yang jelas bagi para politisi, jurubicara, dan kelompok kepentingan. Ada pembagian lain dari komunikator politik, yaitu yang disebut dengan komunikator profesional (Carey, 1969). Pembagian ini muncul karena kemajuan-kemajuan dalam dunia teknologi komunikasi. Sehingga ada batasan/pembagian tugas dan peranan penyampaian pesan politik.
4. Media massa mampu menjadi tempat berdialog tentang perbedaan pandangan yang ada dalam masyarakat atau diantara pemegang kekuasaan (yang sekarang maupun yang akan datang). Media massa sebagai sarana untuk menampung berbagai pendapat, pandangan, dan paradigma dari masyarakat yang ingin ikut andil dalam membangun sistem politik yang lebih baik.
5. Media massa merupakan bagian dari mekanisme penguasa untuk mempertahankan kedudukannya melalui keterangan-keterangan yang diungkapkan dalam media massa. Hal ini kerap terjadi pada masa Orba, ketika masa Presiden Soeharto berkuasa yang selalu menyampaikan keberhasilan-keberhasilan dengan maksud agar masyarakat mengetahui bahwa pemerintahan tersebut harus dipertahankan apabila ingin mengalami kemajuan yang berkesinambungan.
6. Media massa bisa merupakan insentif untuk publik tentang bagaimana belajar, memilih, dan menjadi terlibat daripada ikut campur dalam proses politik. Keikutsertaan masyarakat dalam menentukan kebijakan politik bisa disampaikan melalui media massa dengan partisipasi dalam poling jajak pendapat dan dialog interaktif. Hasil dari poling atau jajak pendapat tersebut akan merefleksikan arah kebijakan para politisi. Seperti hasil poling akhir-akhir ini dinyatakan bahwa sebagian besar masyarakat pemilih pada pemilu 2009, mengharapkan pemerintah hasil Pemilu dapat memprioritaskan perbaikan ekonomi. Hanya sebagian kecil dari masyarakat yang memilih untuk prioritas pemberantasan korupsi. Hal ini yang menjadi kekhawatiran para aktivis anti korupsi bahwa hasil itu akan mempengaruhi arah kebijakan pemerintah sebagai kecenderungan sebagian besar kelompok masyarakat.
7. Media massa bisa menjadi penentang utama terhadap semua upaya dari kekuatan-kekuatan yang datang dari luar media massa dan menyusup ke dalam kebebasannya, integritasnya, dan kemampuannya di dalam melayani masyarakat. Fakta-fakta kebenaran yang diungkapkan oleh

media massa dapat menyadarkan masyarakat tentang adanya kekuatan-kekuatan berupa terorisme atau premanisme, maupun intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang mencoba mengkaburkan suatu permasalahan. 8. Media massa punya rasa hormat kepada anggota khalayak masyarakat, sebagai kelompok yang punya potensi untuk peduli dan membuat sesuatu menjadi masuk akal dari lingkungan politiknya. Adanya kecenderungan dalam menilai para politisi, komunikator politik, aktivis adalah sebagai pihak yang selalu bicara dengan publik. Oleh karena itu Bryce (1900) menyatakan bahwa khalayak komunikasi (khususnya dalam komunikasi politik) pada umumnya akan terpusat pada masalah opini publik. Dari gambaran di atas mengenai fungsi media massa dalam kaitannya sebagai alat politik, maka semakin jelas bahwa peran media massa sangat besar dalam kekuasaan pemerintahan. Pendapat ini juga dipertegas dengan pernyataan Harold Lasswell, bahwa Politik tidak bisa dipisahkan dari pengertian kekuasaan dan manipulasi yang dilakukan oleh para elit penguasa atau counter elite.

Ada suatu anggapan bahwa sebageian besar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih banyak kendala, ada beberapa sebab yang mempengaruhinya:

1. Struktur organisasi huma pemerintah belum memadai
2. Kultur atau budaya kerja praktisi atau pejabat humas melakukan perubahan mind set dari citra sebagai pejabat yang “to be served” menjadi “to serve” kepada public.
3. Masih adanya persepsi terhadap humas yang kurang strategis dalam suatu instansi sehingga ada organisasi humas ada yang kurang berdaya.
4. Belum adanya sarana dan prasara humas yang ditunjang dengan memadai.
5. Kondisi SDM humas pemerintah sebageian besar belum memenuhi syarat yang professional.
6. Penyempaian informasi yang dilakukan petugas pemerintah sering ketinggalan dan bahkan serig tertutup oleh berita-berita yang disampaikan oleh media.

## **B. Humas pemerintah di tengah dinamika politik local**

Dalam konteks otonomi daerah, Pemerintah Provinsi yang dipimpin Gubernur memiliki tugas dan kewenangan berbeda antara pengaturan UU No. 22/1999 dengan UU No. 32/2004. Dalam UU No. 22/1999 tugas dan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Gubernur diatur lebih eksplisit namun terlalu sempit dan terbatas. Sedangkan berdasarkan UU No. 32/2004 tugas dan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Gubernur diatur lebih luas melalui urusan wajib

dan urusan pilihan berdasarkan PP No. 38/2007, tetapi tidak eksplisit karena tugas dan kewenangan yang dimiliki Provinsi masih dapat berbagi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui urusan bersama seperti yang tekankan PP No. 38/2007. Tugas dan kewenangan Gubernur dalam pelaksanaan otonomi daerah terbagi atas dua peran, yaitu sebagai daerah otonom dan sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah. Dalam kapasitas sebagai daerah otonom, Provinsi memiliki kewenangan mengelola desentralisasi, dekonsentrasi serta tugas pembantuan. Sedangkan sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, Provinsi bertugas melakukan koordinasi, pembinaan serta pengawasan terhadap Kabupaten/Kota dalam melaksanakan otonomi daerah di Provinsi bersangkutan. Namun dalam kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, Provinsi, seperti yang ditonjolkan uraiannya dalam tulisan ini, tidak maksimal menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal itu disebabkan oleh alasan administratif dan politik yang dimainkan oleh Bupati/Walikota. Berdasarkan UU No. 22/1999 yang lebih banyak menonjolkan aturan administratif, Gubernur dianggap bukan sebagai atasan Bupati/Walikota. Sementara berdasarkan UU No. 32/2004 yang lebih banyak menonjolkan aturan politis, Gubernur dikesampingkan perannya karena para Bupati/Walikota cenderung mengutamakan sinergi dengan partai politik pengusung atau mungkin pengusaha yang menjadi sponsornya. Penyebabnya adalah Gubernur berbeda ideologi politik atau berbeda agama dan etnik dengan Bupati/Walikota. Dampaknya, banyak kebijakan Kabupaten/Kota yang menyimpang dari semangat otonomi daerah. Salah satu yang krusial dan banyak disoroti Pemerintah Pusat adalah keberadaan Peraturan Daerah (Perda), baik Perda menyangkut investasi maupun eksklusivitas suatu daerah berdasarkan identitas kelompok masyarakat tertentu.

Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan dan manajemen ASN dijelaskan tentang asas yang harus dipakai dalam menjamin keutuhan pegawai dari pengaruh politik, khususnya partai politik. Asas dan manajemen tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum
- b. Profesionalitas
- c. Proporsionalitas
- d. Keterpaduan
- e. Delegasi
- f. Netralitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektif dan efisien

- i. Keterbukaan
- j. Non-diskriminatif
- k. Persatuan dan kesatuan
- l. Keadilan dan kesetaraan
- m. Kesejahteraan

### **C. Humas pemerintah secara intern (netralitas ASN dan Asn dan humas pemerintah yang Profesional)**

Humas pemerintah merupakan mata, telinga, serta mulut untuk mewakili pemerintah kepada masyarakat. Sehingga perlu adanya upaya penyalarsan cara pandang, terutama terkait dengan netralitas ASN dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilihan Presiden di tahun 2019.

“Humas memiliki peran penting untuk mendorong dan menjaga netralitas ASN dari berbagai kegiatan pemilihan umum yang akan datang,”

Sinergi terkait netralitas ASN antara Kementerian PANRB dengan pemerintah daerah pun perlu disosialisasikan kepada masyarakat, termasuk peran kontrol masyarakat dalam mencegah dan mengurangi pelanggaran netralitas ASN. Netralitas merupakan hal yang mutlak bagi ASN, terutama dalam masa-masa pelaksanaan pemilu. Hal ini berkaitan dengan ASN sebagai pelaksanaan kebijakan publik serta perekat dan pemersatu bangsa. Dengan bersikap netral, maka ASN tidak akan memihak kepada siapa pun dan tetap dapat memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, keberpihakan ASN berpotensi menyeret ASN dalam ranah politik praktis serta terjadinya praktek politisasi birokrasi. “Wajib hukumnya bagi ASN untuk menjaga netralitas dalam pemilu,”.

Sejak 2004, terdapat sejumlah peraturan yang mengatur mengenai netralitas ASN. Namun kurangnya sosialisasi atas peraturan tersebut menyebabkan kurangnya pemahaman ASN untuk memiliki sikap netralitas. Pelaku kehumasan pemerintah daerah diimbau agar dapat berkreasi dalam memberikan pemahaman mengenai netralitas kepada ASN di daerah secara mudah serta dapat menyosialisasikannya secara masif.

Dengan adanya sosialisasi terkait peraturan netralitas ASN dalam pemilu, maka ASN memahami pentingnya netralitas sehingga ASN dapat menjamin pelaksanaan pesta demokrasi

dapat berjalan dengan LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia). “Peran humas sangat diperlukan dalam rangka menjaga independensi ASN,” jelasnya.

“Ada dua hal yang dapat dilakukan oleh humas. Pertama, mendorong sosialisasi netralitas ASN bagi instansinya masing-masing. Dan kedua, humas harus secara aktif menyebarluaskan jargon tentang ASN bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019,” tambah Teguh.

Seminar Bakohumas Daerah ini terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama, dimoderatori oleh Kepala Bidang Humas Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi DI Yogyakarta Iswantoro, membahas mengenai netralitas ASN secara khusus. Sementara sesi kedua menghadirkan redaktur Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA Taufik Miskudin. Sesi ini membicarakan tentang peran humas dalam membangun komunitas sinergi humas dalam komunikasi dan penyebaran informasi.

Ada 4 modus keterlibatan ASN dlm Pilkada, yaitu:

- ASN terlibat langsung menjadi operator
- Keterlibatan ASN dalam Pilkada masuk dalam kelompok Pemikir, seperti menyusun strategi pemenangan
- Sebagai fasilitator kebutuhan operasional petahan yang cuti.
- Keterlibatan menyediakan dana karena pegang proyek

**Sebab ASN tidak Jera Dlm Pilkada, yaitu:**

- Faktor lingkungan birokrasi berdampingan dengan aktivitas politik
- ASN berada dalam lingkungan politik, bila membuat kebijakan selalu konsultasi dengan DPRD
- Ketidakjelasan karir ASN sehingga mereka mencari jabatan secara praksis, apalagi utk pejabat eselon 2 dan 1 terlibat dalam dunia politik
- Keterlibatan ASN dalam Pilkada karena ketidakmampuan politisi mengimbangi kemampuan Birokrasi

Humas Pemerintah Bersikap. Yaitu:

- ▶ Netralitas ASN
- ▶ Sikap Profesional ASN:
  - ▶ Bakohmas harus mendukung proses demokrasi dan pemilu berjalan netral



- ▶ Sukses pemilu termasuk peran serta Bakohumas yang sentral
- ▶ Pejabat Humas harus bertanggung jawab menciptakan suasana realistis dalam Pemilu

Menjaga ASN tidak terlibat Politik Praktis

- ▶ Pembina ASN dari Pegawai sendiri buka pejabat politik
- ▶ Perkuat kontrol dari masyarakat
- ▶ Sanksi terhadap siapa yang melanggar
- ▶ Harus ada batas yang jelas ttg tugas pejabat karier dengan pejabat politik
- ▶ Kemauan dari partai politik utk meningkatkan SDM nya sehingga bila menduduki jabatan public dapat berkompetisi
- ▶ Menumbuhkan mentalitas dan moralitas yang baik
- ▶ Reformasi manajemen kepegawaian dengan menegakan hukum yang baik dan adanya reward bagi yang berprestasi
- ▶ Jadilah Humas Pemerintah yang Profesional

#### **D. Membangun citra dan reputasi**

Keberadaan humas sangat dibutuhkan dan penting untuk membangun dan menjaga adanya saling pengertian antar organisasi dengan stakeholder dan masyarakat umum, dengan tujuan menyangkut tiga hal yaitu reputasi, citra dan komunikasi mutual benefit relationship.

Untuk berkomunikasi dengan publik, Humas juga mendekatkan diri melalui media, baik melalui iklan, media sosial ataupun dengan menyediakan informasi mengenai perkembangan organisasi terkini.

Tidak hanya itu, Humas perlu juga menyediakan layanan informasi berupa Contact Center yang diperuntukkan bagi stakeholder ataupun masyarakat umum yang ingin menyampaikan keluhan dan pertanyaannya di bidang layanan organisasi.

Humas berfungsi untuk mengetahui dan mengevaluasi opini-opini publik yang berkaitan dengan organisasi, serta memanfaatkan komunikasi sebagai media untuk memberikan informasi yang sesuai dengan fakta, disampaikan dengan cara-cara yang baik dan benar untuk mengarahkan opini publik ke arah yang diharapkan.

HUMAS bisa berfungsi sebagai marketing yang harus “jualan” apa yang dipunyai organisasi. Fungsi marketing sangat kental di humas sebagai komunikasi massa.

Produk-produk yang dimiliki disampaikan ke masyarakat, melalui strategi komunikasi tujuannya supaya masyarakat tahu ada produk yang dikerjakan sehingga masyarakat tahu



kinerja organisasi tersebut. Jadi upaya-upaya yang dilakukan humas ada dua, yaitu menjangkau opini publik dan marketing.

### **Sumber Daya HUMAS**

Seiring dengan kesadaran bahwa humas memegang peranan yang sangat penting dalam membangun citra organisasi, keberadaan humas adalah suatu kebutuhan yang harus diprioritaskan. Untuk itu perlu juga didukung SDM (Sumber Daya Manusia) dengan kapasitas yang kompeten di bidang kehumasan serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Profesionalitas dalam kehumasan menjadi kunci utama dalam menjalankan tugas, untuk itu diperlukan standar kompetensi bagi siapapun yang ditugaskan pada posisi tersebut sebagai budaya kerja yang baik. Upaya penyampaian pesan yang dilakukan, sudah menunjukkan bahwa humas sudah menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional.

Akan tetapi SDM yang berkualitas dan anggaran yang memadai tidak akan berarti banyak apabila tidak didukung oleh strategi yang tepat.

Agar Humas dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu strategi komunikasi dan publikasi yang tepat berorientasi pada pembentukan opini publik. Dalam pelaksanaannya perlu didukung oleh kemudahan akses kepada unsur pimpinan dan dukungan satuan kerja lain yang terlibat.

Organisasi yang ideal adalah setiap anggota dan unsur internal menyadari bahwa sesungguhnya merupakan humas bagi organisasinya.

Dengan adanya kesadaran tersebut, maka setiap anggota organisasi akan konsisten menjalankan peran kehumasan, baik dengan menghindari perbuatan yang akan berdampak negatif bagi citra organisasi maupun dengan aktif mengkomunikasikan hal-hal yang sifatnya positif sehingga mampu membangun citra organisasi di mata pihak eksternal.

### **Tugas:**

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Bagaimana Konsep Good Governance?
2. Bagaimana Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik?
3. Apakah Implementasi undang-undang Keterbukaan Informasi Publik/
4. Bagaimana Memahami Konflik dan Krisis dalam kenegaraan?

### **Daftar Pustaka**

Suprawoto. 2018. *Government Public Relations*. Jakarta. Prenadamedia Group.

Suryadi. 2007. *Strategi mengelola public relations Organisasi*. Jakarta. Edsa Makota.

Rotman, Morris B., 2001. *Opportunities in public relations Careers*. Luisa Gerasimo. USA.

Ilcox, Dennis L. atc. 2009. *public relations: Strategies and Tactics*. New York. USA.

Wasesa, Silih Agung. 2005. *Strategi Public Relations*. Jakarta. PT. Gramedia.

Muslim Basya dan Irma Sati (Ed). 2006. *Tantangan Indonesia Baru. Strategi dan Aktivitas Public Relations*. Jakarta. BPP Perhumas.

Heryanto, gun gun, Zatkasy, Irwa. 2012. *Public Relations Politik*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Jebarus, Felix, Muslim Basya. 2013. *Standar Kompetensi Menuju Humas Profesional*. Jakarta. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Gassing, Syarifuddin., Suryanto. 2016. *Public Relations*. Yogyakarta. CV. Andi.

Cutlip, Scott M.dkk. 2005. *Effectives Public Relation* ed. 8. Jakarta: Indeks.

Herimanto, Bambang. dkk. 2007. *Public Relation dalam Organisasi*. Jogja: Santusta.

Soemirat, Soleh. Elvinaro Ardianto. 2005. *Dasar – Dasar Public Relation*. Bandung: Rosda.

Willcox, Dennis L. dkk. 2006. *Public Relation Strategy & Taktik*. Batam: Inter Aksara.

Ruslan, Rosady. 2001. *Etika Kehumasan Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Ardianto, Elvinaro. 2013. *Handbook of Public Relations*. Bandung: Simbiosia

Ruslan, Rosady. 2014. *Manajemen Humas dan Media Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers

Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajahmada Universiti Press.

Effendi, Sofian. 2005. *Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance*. Makalah Seminar Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN 22 September 2005.

Cutlip, Center, Broom. 2009. *Effektive Public Relations*. Jakarta: Kencana.

<http://rofiana.wordpress.com/2011/06/09/makalah-peran-humas-dalam-lembaga-pendidikan/>

<http://haris-tambera.blogspot.com/2011/01/pelaksanaan-fungsi-humas-pemerintah.html>

<http://andyretno.wordpress.com/2009/01/06/memaksimalkan-fungsi-humas-dalam-dunia-pendidikan/>

<http://humas.sragenkab.go.id/?p=1262>

<http://operadewa.wordpress.com/2011/12/11/tantangan-dan-kompetensi-profesi-public-relations/>

Riant Nugroho D, *Reinventing Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Elex Media Komputendo). CFG. Sunaryati Hartono, SH, et all, *Panduan Investigasi untuk Ombudsmen Indonesia*, (Jakarta: Komisi Ombudsmen Nasional, 2003). Dokumen Kebijakan UNDP, *Tata Pemerintahan menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan*, ad. *Tata Pemerintahan yang Baik dari Kita untuk Kita*, (Jakarta: Partnership for Governance Reform In Indonesia, tt).

[http://azhariee.multiply.com/journal/item/1/Public\\_Relations\\_Indonesia\\_Antara\\_Era\\_Sertifikasi\\_dan\\_Cyber\\_Public\\_Relations?&show\\_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem](http://azhariee.multiply.com/journal/item/1/Public_Relations_Indonesia_Antara_Era_Sertifikasi_dan_Cyber_Public_Relations?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem)

<http://research.mercubuana.ac.id/?p=50>

<https://pakarkomunikasi.com/fungsi-humas-dalam-lembaga-pemerintahan>

<https://setkab.go.id/peran-humas-dalam-mensukseskan-program-pemerintah/>